

Merekonstruksi Literasi Demokrasi Pemilih Pemula (Sebuah Strategi untuk Capaian Pemilu Berkualitas di Era Milenial)

Oleh :
Wayan Lasmawan
Profesor Pendidikan IPS Undiksha

Abstrak

Demokrasi yang dilakukan tanpa aras dan pondasi *rule of game* yang akuntabel merupakan sebuah otoritarian kekuasaan. Disisi lain, hukum tanpa politik adalah kemandulan visi orientasi sebuah demokrasi sebagai jalan menuju kekuasaan. Keduanya tidak boleh terpisah dalam balutan etika moral politik yang tervalidasi. Namun selama perjalanan demokrasi kita sampai saat ini, ketiga hal tersebut, terkesan samar dan mendekati buram di mata rakyat dalam melakukan hak-hak dan kewajiban demokrasi. Bangsa Indonesia telah memiliki pengalaman yang cukup dalam berdemokrasi, dan oleh dunia kita telah dianggap terdepan dalam praktik prosedur demokrasi, walaupun pada hakekatnya masih belum mampu menyentuh aras substansial demokrasi itu sendiri. Artinya praktik demokrasi kita masih sebatas aras retorika politik yang indah dalam wacana publik yang mendayu dayu. Namun harus kita akui pula bahwa, sesungguhnya, rakyat sudah sangat siap berdemokrasi, dalam arti bisa menerima dan melaksanakan konsep demokrasi yang disodorkan oleh negara. Masalahnya adalah desain model dan konsep praktik demokrasi yang ditawarkan oleh negara, belum sepenuhnya berpihak pada kepentingan hak dan kebutuhan kedaulatan rakyat dalam berdemokrasi. Praktek demokrasi kita masih bias dan sarat dengan kepentingan elite partai politik, dan kedaulatan rakyat masih lebih sering diposisikan sebagai objek politik. Generasi muda sebagai salah satu komponen demokrasi yang potensial, sampai saat ini belum terberdayakan dengan baik, bahkan mereka cenderung ditempatkan sebagai *weak component of our democracy*. Disisi lain, fakta menunjukkan bahwa pemilih muda adalah *the spearhead and commander of the actual democratic movement*. Bertalian dengan rasional ini, maka tulisan singkat ini mencoba untuk membedah 3 (tiga) hal dasar yaitu: (1) bagaimana profil pemilih muda dalam praktek demokrasi Indonesia, (2) tantangan dan peluang pemilih muda dalam demokrasi Indonesia, dan (3) rekonstruksi literasi pemilih muda dalam peningkatan kualitas demokrasi Indonesia. Pembahasan ketiga domain tersebut dilakukan secara *bibliography research* dengan mengedepankan *fundamentally actual systematic infidelity methods* yang mendasar untuk melahirkan preposisi yang mampu mewakili *state of problem* yang sebenarnya.

A. Pendahuluan

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan sebuah penegasan atas makna dan syarat sebuah negara yang menyatakan dirinya menganut demokrasi. Berdasarkan pengalaman empiris di banyak negara demokrasi, Pemilu merupakan salah satu pijakan bagi hadirnya konsolidasi demokrasi, yakni praktik demokrasi yang kian matang dan stabil. Karena itu, perwujudan konsolidasi demokrasi melalui pemilihan presiden 2019 dengan segala bentuk atraksi demokratisnya yang baru berlalu, bukan sebuah mimpi, melainkan sebuah keniscayaan. Meminjam gagasan Adam Przeworski (1991) dalam *Democracy and the Market: Political and Economic Reforms in Eastern and Latin America*, ini dicapai melalui stabilisasi, institusionalisasi, dan legitimasi demokrasi serta keyakinan yang tumbuh dari semua elite politik dan masyarakat untuk menjadikan demokrasi sebagai *the only game in town*.

Penanda lain, dari negara yang telah mengkonsolidasikan demokrasi secara penuh (full democracy), menurut Laurence Whitehead (1989) dalam "*The Consolidation of Fragile Democracies*", adalah manakala telah terpenuhinya beberapa criteria, antara lain: hadirnya kompetisi yang sehat; partisipasi publik yang meluas; serta kebebasan dalam mengekspresikan gagasan, ide, dan pikirannya tanpa terdiskriminasi dan terintimidasi. Pada konteks ini, konsolidasi demokrasi memerlukan kesinambungan beberapa factor secara simbiosis mutualis, antara: (1) civil society, political society, dan partai politik, (2) institusi pemilu, regulasi pemilu, pemilih, dan elite politik yang kian dapat mematuhi prosedur serta aturan kompetisi yang telah disepakati; dan (3) supremasi hukum (rule of law), ketika semua institusi politik-demokrasi dan masyarakatnya menempatkan hukum sebagai panglima (Juan J. Linz dan Alfred Stepan (1996). Tugas semua komponen bangsa adalah menjaga dan memastikan agar Pemilu berlangsung demokratis: transparan, akuntabel, jujur, dan adil. Dalam pemilihan yang demokratis ini akan melahirkan model kompetisi dalam merebut kekuasaan legislative maupun eksekutif secara bermartabat dan demokratis.

Indonesia sebagai sebuah negara telah memilih formasinya sebagai negara moderen dengan sistem demokrasi. Sebagai suatu sistem, demokrasi telah dijadikan alternatif dalam berbagai tatanan aktivitas dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia. Seperangkat produk hukum telah menjadi regulator dan instrumen demokrasi yang efektif, salah satunya adalah UU Nomor 1 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang mekanisme pelaksanaan pilkada yang digelar secara serentak di seluruh Indonesia. Dengan mekanisme ini, tercatat Indonesia merupakan negara yang paling progresif di dalam menjalankan mekanisme demokrasi prosedural pemilu. Pilkada serentak telah digelar secara bertahap, yang dimulai pada 2015 s/d 2019, sesuai UU Pilkada yang baru, pelaksanaan pilkada akan benar-benar serentak total sekitar tahun 2024. Setahap demi setahap, konsolidasi demokrasi semakin menunjukkan bentuknya, perbaikan pemilihan kepala daerah baik dari aspek prosedural maupun substansi terus dirancang demi pembangunan demokrasi. UU tentang Pemilihan Gubernur, Walikota dan Bupati mengamanatkan bahwa pilkada yang dilakukan secara serentak harus mampu melahirkan pemimpin daerah yang memiliki kompetensi, integritas, dan kapabilitas serta memenuhi unsur akseptabilitas sehingga nantinya mampu memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat (Bakti, 2017).

Kendati secara prosedural Indonesia telah melakukan pemilu (pemilu nasional dan pilkada) secara berkala, namun dalam prosesnya masih dapat dikatakan belum sepenuhnya menjadi demokratis substantif karena masih diwarnai oleh berbagai persoalan di dalam proses penyelenggaraannya. Di antaranya dimulai dari tahapan pendaftaran calon oleh KPU, proses pendaftaran pemilih, konflik di masa kampanye, maraknya politik uang, dan tahapan penetapan pemenang pemilu. Pada konteks jika Indonesia mau menjadi negara demokrasi substantif maka sistem politiknya haruslah disehatkan terlebih dahulu. Sebuah sistem politik demokrasi dikatakan mempunyai kinerja baik, manakala mampu memproses *inputs* sistem politik menjadi *outputs* sesuai dengan tujuan-tujuan yang diinginkan (Syarbaini, dkk, 2004; Kantraprawira, 2006; Budi Winarno, 2007).

Disadari atau tidak bahwa dalam Pemilu (Pileg, Pilpres, maupun Pilkada) peran serta masyarakat menjadi sangat penting dalam sebuah negara demokrasi. Sukses tidaknya pelaksanaan Pemilu salah satunya ditentukan oleh bagaimana partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya secara cerdas. Partisipasi merupakan proses aktif dan inisiatif yang muncul dari masyarakat dalam suatu kegiatan. Di Indonesia berpartisipasi dalam politik dijamin oleh negara. Hal ini tercantum dalam UUD 1945 pasal 28 yang berbunyi "kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang".

Selain itu, diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 mengenai jaminan hak-hak sipil dan politik, dimana poin-poin hak yang harus dilindungi oleh negara mengenai hak berpendapat, hak berserikat, hak memilih dan dipilih, hak yang sama dihadapan hukum dan pemerintahan, dan hak mendapatkan keadilan.

Dalam sebuah kontestasi demokrasi, terlebih jika sistem dan praktik demokrasi itu belum menempatkan nilai moralitas, etik, dan spiritual agamis sebagai dasar aktivitasnya (fundamental values), praktik kecurangan sangat mungkin terjadi. Kekhawatiran itu semakin menguat, manakala aspek transparansi hanya bersifat retorika dalam wacana publik berdasarkan kalimat undang-undang yang rapih, tanpa pernah teruji dan terbukti dalam praktik demokrasi Pemilu yang saat ini tengah berproses. Salah satu pilar demokrasi untuk kasus Indonesia adalah keberadaan dan peran serta generasi muda sebagai pemilih pemula. Eksistensi mereka sangat menentukan jalan dan makna demokrasi yang terlahir dari rangkaian proses panjang yang mana hal tersebut nantinya menjadi catatan sejarah demokrasi bangsa ini di masa depan. Dalam upaya menjaga sistem politik inilah perlu diupayakan bagaimana usaha-usaha bersama dalam menyelamatkan peran serta, partisipasi aktif dari warganegara dalam menyokong sistem demokrasi Indonesia, yakni dengan cara "*melindungi dan merekonstruksi literasi pemilih pemula sebagai strategi untuk mencapai Pemilu yang berkualitas di era milenial*". Hal ini menjadi semakin urgen untuk dibedah, seiring dengan semakin menguatnya tagihan atas partisipasi generasi muda dalam segala peran dan posisinya di era milenial, khususnya dalam pembangunan demokrasi yang elegan. Stratifikasi praktek dan makna demokrasi dalam sebuah negara, sangat ditentukan oleh peran dan kesadaran generasi muda dalam menggunakan hak-hak politik dan kenegaraannya.

B. Pembahasan

1. Gambaran Pemilih Pemula Pada Pemilu 2019

Jumlah pemilih pemula pada pemilu 2019 mencapai kisaran 14 juta. Angka yang besar bakal mempengaruhi para calon legislatif dan calon presiden untuk bisa merebut hati para pemilih muda. Direktur Eksekutif Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraeni mengatakan, pemilih muda memang lebih dari 50% yang jika di kategorisasi hingga usia 35 tahun maka jumlahnya mencapai 79 juta, tetapi jika sampai 40 tahun maka jumlahnya mencapai 100 juta. Kelompok milenial ini memiliki adaptasi politiknya yang agak berbeda dengan kelompok umur yang lebih tua. Mereka lebih dinamis dan lebih cepat berubah persepsi politiknya, terutama sangat terpengaruh oleh lingkungan. Kadang-kadang mereka cepat sekali apatis terhadap proses politik, karena menganggap dinamika politik itu tidak menarik dan jauh dari keseharian mereka.

Jika para pemilih pemula dan milenial ini di kelola dengan baik bisa menjadi penentu niat politik dan kepastian legalitas demokrasi. Tetapi sangat disayangkan kalau pemilih muda ini terpengaruh oleh nilai-nilai politik yang kurang baik dari lingkungan (tradisional, pragmatis, apatis) maka demokrasi kita yang akan menjadi taruhannya. Untuk itu, menjadi tantangan besar bagi para calon untuk merebut hati para pemilih muda dan milenial dengan politik-politik gagasan yang memajukan bangsa, karena mereka ini yang akan menjadi pemimpin kita (*the next generation*). Jadi bukan sekadar menjadi pertarungan kemenangan pemilu tetapi bagaimana keberadaan mereka menjadi modalitas untuk pembangunan mereka yang lebih baik, pemilih milenial ini menjadi kantong strategis suara para calon peserta pemilu. Syaratnya dengan pendekatan yang sesuai di era zaman now, jadi tidak hanya pendekatan pragmatis tetapi juga pendekatan investasi jangka panjang negara kita.

Sudah menjadi hal lazim saat menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) ataupun Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) salah satu topik pembahasan adalah Pemilih Pemula. Pemilih Pemula adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang pada hari

pemilihan atau pemungutan suara adalah WNI yang sudah genap berusia 17 tahun dan atau lebih. Atau sudah/pernah menikah yang mempunyai hak pilih, dan sebelumnya belum termasuk pemilih karena ketentuan Undang-Undang Pemilu. Pemilih pemula memiliki karakter yang berbeda dengan pemilih yang sudah terlibat pemilu periode sebelumnya yaitu: (1) Belum pernah memilih atau melakukan penentuan suara di dalam TPS; (2) Belum memiliki pengalaman memilih; (3) Memiliki antusias yang tinggi; (4) Kurang rasional; (5) Biasanya adalah pemilih muda yang masih penuh gejolak dan semangat, dan apabila tidak dikendalikan akan memiliki efek terhadap konflik-konflik sosial di dalam Pemilu; (6) Menjadi sasaran peserta pemilu karena jumlahnya yang cukup besar; (7) Memiliki rasa ingin tahu, mencoba, dan berpartisipasi dalam pemilu, meskipun kadang dengan berbagai latar belakang yang rasional dan semu.

2. Tantangan Pemilih Pemula dalam Demokrasi Indonesia

Berdasarkan beberapa kaji petik dan temua penelitian sebagaimana yang dirangkum oleh penulis, terdapat sejumlah kendala dan problem yang melingkupi pemilih pemula dewasa ini di antaranya adalah: **Pertama**, pemilih pemula yang telah berumur 17 tahun dan ingin mengikuti Pemilu masih banyak yang belum melakukan perekaman dan pencetakan e-KTP, alias belum memiliki e-KTP. **Kedua**, selain problem administratif, problem lainnya di antaranya; pemilih pemula rawan dipolitisasi dan dijadikan komoditas politik untuk mendongkrak popularitas dan elektabilitas kontestan Pemilu, baik Pilpres maupun Pileg. **Ketiga**, pemilih pemula rawan didekati, dipersuasi, dipengaruhi, dimobilisasi, dan sebagainya untuk bersedia mengikuti kampanye yang dilaksanakan, padahal sebelum ini, para kontestan Pemilu tersebut tidak jelas kepeduliannya terhadap pemilih pemula. **Keempat**, realitas politik uang dalam Pemilu, Politik uang dalam pemilu terjadi karena faktor mutualisme dan interdependensi, baik dari sisi calon maupun pemilih. Si calon ingin mendapatkan atau mempertahankan kursi jabatan dengan jalan instan. Pemilih pun ingin dihargai hak dan keinginannya oleh si calon, sehingga menjadikan suara sebagai komoditas dan instrumen penekan. Pemilih pemula sering menjadi sasaran empuk politik transaksional, atau politik uang. Politik uang dalam konteks pemilih pemula bisa berangkat atas inisiatif dari partai politik, tim kampanye, dan para calo politik (political broker). Tetapi, bisa juga berasal dari inisiatif pemilih pemula itu sendiri. Jangan lupa, di antara pemilih pemula juga sudah mengenal politik uang serta sumber-sumber dari politik uang tersebut. **Kelima**, selain hal di atas ada persoalan berkenaan dengan pengetahuan regulasi aturan-aturan hukum oleh pemilih pemula tentang pemilu. Pemilih pemula juga masih banyak mengidap penyakit labilitas dan emosionalitas. Pada kontestasi Pemilu, pemilih pemula berada dalam pusaran antara antusiasme politik dengan apatisme politik. Pada satu sisi sangat bersemangat dan ingin mengetahui seputar Pemilu, khususnya melalui media sosial. Namun, belum tentu antusiasme tersebut simetris dengan realitas perilaku politiknya. Bahkan tidak sedikit kalangan pemilih pemula, termasuk mahasiswa, lebih memilih tidak menyalurkan hak pilihnya alias Golput. Dengan kata lain antusiasme politik kalangan muda, khususnya pemilih pemula di politik lebih merefleksikan suatu fenomena romantisme politik atau sensate democracy. **Keenam**, budaya politik masyarakat, kesadaran pemilih pemula dalam menjalankan hak pilihnya juga tidak dapat mengabaikan budaya politik yang ada. Gabriel A. Almond dalam Budi Winarno (2007) membedakan budaya politik menjadi tiga budaya politik yakni; budaya partisipan, budaya politik subjek, dan budaya politik parokial. Budaya politik Indonesia saat ini merupakan kombinasi antara ketiga tipe budaya tersebut, yakni antara *parochial-subject culture*, *subject-participant culture*, *parochial-participant culture* atau dengan kata lain sebagai civic culture. Dalam hal ini budaya politik Indonesia bergerak di antara *subject-participant culture* dan *parochial-participant culture*.

- a. *Subject-participant culture* ditandai oleh menguatnya partisipasi politik masyarakat dalam kehidupan politik terhadap input-input politik, sementara waktu yang bersamaan berkembang rasa ketidakmampuan masyarakat untuk mengubah kebijaksanaan. Rasa sebagai woong cilik, orang-orang tidak mampu, dan termarjinalkan membuat mereka hanya berorientasi pada output sistem politik dibandingkan dengan kepeduliannya terhadap proses input sistem politik. Ini karena disebabkan oleh budaya dari elit politik yang lebih dominan dari keberanian masyarakat itu sendiri.
- b. *Parochial-participant culture* ditandai oleh menguatnya wacana kedaerahan pasca-diterapkannya otonomi daerah. Dalam hal ini, terdapat tekanan dan desakan yang kuat di beberapa daerah agar pemimpin-pemimpin lokal seperti wali kota/bupati dan gubernur dipilih dari putra-putra daerah.

Secara akademis, budaya demokrasi mengandaikan adanya empati dan partisipasi, yakni kesanggupan untuk memahami dan menempatkan diri dalam situasi orang lain, yang menjadi ajakan bagi kesediaan berperan aktif dalam penyelesaian masalah-masalah kolektif. Kemampuan empati dan partisipasi ini bisa ditumbuhkan oleh kekuatan literasi (Lerner, 1958). Perluasan kemampuan literasi dan jumlah referensi kognitif mendorong desentralisasi penguasaan pengetahuan. Desentralisasi ini secara perlahan memerosotkan nilai sakral elitisme seraya memperkuat egalitarianisme. Secara konseptual, elitisme mengandung mentalitas narsistik yang berpusat pada diri sendiri, tanpa empati dan kesungguhan mengajak partisipasi.

Egalitarianisme mengandung kepekaan akan kesedarajatan hak, oleh karenanya berusaha mencegah timbulnya dominasi dengan menggalakan partisipasi (Hanvitra, 2019). Artinya bahwa dalam negara dengan tradisi literasi yang kuatlah demokrasi bisa tumbuh dengan kuat. Athena sering dirujuk sebagai "ibu demokrasi" karena berakar pada tradisi literasi yang kuat, berkat penemuan alfabet. Tingkat literasi dan keluasan erudisi masyarakat, khususnya di Indonesia, saat ini mendapatkan ancaman dari berbagai penjuru. Ancaman *pertama* datang dari "vokasionalisme baru" (*new vocationalism*), yakni suatu konsepsi utilitarian dari lembaga-lembaga pendidikan yang menekankan keterampilan teknis. Dalam arus ini, pengajaran bahasa mengabaikan dimensi kesasteraan, seraya memberi perhatian yang berlebihan pada pengajaran tata-bahasa dalam disiplin keilmuan dan kejuruan yang spesifik (Hanvitra, 2019). Fenomena ini melahirkan apa yang disebut Frank Furedi (2006) sebagai "the cult of philistinism", pemujaan terhadap budaya kedangkalan oleh perhatian yang berlebihan terhadap interes-teres material dan praktis. Ancaman *kedua*, berupa terpaan mendalam dan meluas dari multimedia, khususnya televisi. Selain biasanya terhadap kelisanan, kemaharajalelaannya di tanah air, saat tradisi literasi rapuh dan kesasteraan dimarjinalkan, memberi penguatan terhadap budaya kedangkalan seraya melemahkan fungsi-fungsi keberaksaraan. Literasi secara langsung akan meningkatkan partisipasi warga negara dalam berdemokrasi. Literasi mengakibatkan warga negara dapat mengkritisi isu-isu politik dan jalannya demokrasi secara terbuka dan akuntabel. Literasi mengakibatkan seorang individu dapat mengakses media yang memungkinkannya mengetahui informasi-informasi terbaru sesuai dengan keinginan dan kemampuannya. Artinya bahwa secara grounded demokrasi harus berakar di bumi, karena demokrasi hanya bisa tumbuh subur jika tersedia basis literasi bagi setiap warga negara yang menjadi bagian inti dari demokrasi itu sendiri.

3. Merokonstruksi Literasi Pemilih Pemula Mejadi Pemilih Cerdas

Pertaruhan yang dilakukan oleh para pemilih pemula dalam mengarungi dinamika demokrasi telah terbukti menghasilkan beberapa terobosan hukum dalam perpolitikan nasional. Hal ini berpulang pada seberapa sadar dan pemahnyanya (literasi) mereka atas makna dan hak demokrasi yang dilekatkan kepadanya. Literasi adalah

istilah umum yang merujuk kepada seperangkat kemampuan dan keterampilan individu dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian tertentu yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari (<https://id.wikipedia.org>). Dalam konteks ini literasi pemilih pemula lebih ditekankan pada kesadaran dan kemelek-politikan dari warganegara muda menjadi pemilih yang rasional-kritis cerdas dan bertanggungjawab.

Merokonstruksi literasi pemilih pemula mejadi pemilih cerdas dapat mengambil bentuk dari apa yang disebut dengan konsep *civic literacy* yakni pengetahuan dan kemampuan warga dalam mengatasi masalah-masalah sosial, politik, dan kenegaraan yang menuntut warganegara bertindak secara otonom. *Civic Literacy* juga disebut kemelek-wacanaan kewarganegaraan (Suryadi, 2010: 30). Dalam khasanah ilmu kewarganegaraan, *civic literacy* ditempatkan sebagai elemen dasar kebajikan politik warga negara (*political virtue of citizenship*), di dalam *civic literacy* tersirat penguasaan bentuk pengetahuan politik warga negara pada khususnya dan akan dimanifestasikan dalam aktivitas kewarganegaraan (Suryadi, 2010). Dwipayana (2013) menjelaskan bahwa *civic literacy* dimaknai sebagai kapasitas pengetahuan dan kemampuan warga negara untuk memahami dunia politik mereka, atau secara lebih luas diartikan sebagai kapasitas pengetahuan tentang bagaimana untuk secara aktif berpartisipasi dan memulai perubahan dalam komunitas dan masyarakat yang lebih besar. Kemauan dan kemampuan untuk terlibat dalam discourse publik. *Civic literacy* merupakan fondasi masyarakat demokratis dan manifestasi dari *Power Citizen*.

Berangkat dari konsep tersebut, maka pemerintah dan KPU sebagai penyelenggara negara dan penyelenggara Pemilu terus melakukan upaya melalui regulasi serta bekerjasama dengan pemangku kepentingan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat pemilih pemula. Pemilih pemula mempunyai pengaruh besar terhadap kehidupan demokrasi di masa mendatang, selain jumlahnya yang akan terus bertambah, potensi daya kritis mereka juga dapat berkontribusi dalam menentukan hasil pemilu. Dengan peta problem pemilih pemula seperti itu, semua pihak diharapkan terlibat aktif untuk mencari solusi dan terobosan dengan tujuan untuk merekonstruksi literasi dan menyelamatkan pemilih pemula.

Meminjam komponen-komponen yang ada dalam *civic literacy*, seperti komponen pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*), dan karakter atau sikap kewarganegaraan (*civic dispositions*) yang merupakan faktor determinan dalam upaya mewujudkan warga negara yang baik. Dilihat dari perspektif integrasi politik, merupakan aspek penting dalam mengembangkan perilaku integratif pemilih pemula yang berkontribusi secara positif terhadap integrasi bangsa (*nation building*) dan integrasi elit dengan rakyat. Keberhasilan mengembangkan perilaku integratif dalam diri pemilih pemula dapat mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang produktif untuk mewujudkan kebaikan bersama sebagaimana yang dikehendaki dalam cita-cita nasional dan tujuan bernegara (Cholisin, 2010). Pemilih pemula adalah aset bangsa, sejalan dengan ungkapan ini, bahwa generasi Indonesia boleh berganti dari generasi tua digantikan oleh generasi muda, namun nilai-nilai luhur dalam sistem negara demokrasi Pancasila di Indonesia harus tetap terwariskan dengan baik ke kenerasi muda, dan ini adalah tugas dari pemilih pemula.

Merokonstruksi literasi pemilih pemula tidak hanya mengambil bentuk *civic literacy* saja yang terdiri dari pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*), dan karakter atau sikap kewarganegaraan (*civic dispositions*) namun juga mengembangkan kecakapan ,literasi yang lainnya. Kecakapan literacy yang lainnya yakni Literasi media, Literasi Digital, Literasi informasi, Literasi saintifik, Literasi hukum, Literasi ketatanegaraan. **Literasi media**

adalah kemampuan untuk memahami, menganalisis, dan mendekonstruksi pencitraan media. Kemampuan pemilih pemula untuk melakukan hal ini ditujukan agar pemilih pemula sebagai konsumen media menjadi sadar (melek) tentang cara media dikonstruksi (dibuat) dan diakses, dan untuk menghindari Hate Speech dan Hoax.

Literasi digital adalah ketertarikan, sikap dan kemampuan pemilih pemula yang menggunakan teknologi digital dan alat komunikasi untuk mengakses, mengelola, mengintegrasikan, menganalisis dan mengevaluasi informasi, membangun pengetahuan baru, membuat dan berkomunikasi dengan orang lain agar dapat berpartisipasi secara efektif dalam pemilu. **Literasi informasi** adalah kemampuan untuk mengetahui kapan informasi dibutuhkan, diidentifikasi, menemukan, mengevaluasi, dan secara efektif menggunakan informasi tersebut untuk isu atau masalah yang dihadapi. **Literasi saintifik** adalah kemampuan menerapkan penguasaan sains dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Seiring perkembangan zaman, literasi saintifik dipilih sebagai tujuan utama pendidikan sains karena dianggap bisa digunakan untuk mempersiapkan generasi saat ini untuk menghadapi saat nanti. **Literasi hukum** yaitu tingkat pengetahuan dan pemahaman tentang dasar hukum dan regulasi, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilu, pilpres dan pilkada (<https://id.wikipedia.org>).

Budaya literasi politik ini penting dimiliki oleh pemilih pemula, karena ada beragam tantangan yang saat ini dihadapi pemilih pemula, dan kemajuan teknologi adalah salah satunya. Sejak bergulirnya masa kampanye Pemilu, Pilpres dan Pilkada serentak, berbagai berita bohong menyebar melalui media sosial. Kebenaran dan kebohongan berita melebur menjadi satu. Pengguna medsos sulit membedakan kebenaran dan kebohongan berita itu.

Mencermati kemajuan teknologi, pendidikan terhadap pemilih pemula juga harus diarahkan pada pendidikan nilai dan karakter. Ini yang perlu ditekankan. Usia muda dengan semangat dan emosi yang meledak-ledak harus diiringi dengan etika politik dan pendidikan demokrasi era teknologi. Pemilih pemula juga harus diarahkan pada pentingnya beretika di media sosial di tengah maraknya penyimpangan yang terjadi di dunia maya itu. Dengan demikian, para pemula dapat menjadi “agen” etika politik yang mewarnai Indonesia. Tentu saja kita berharap agar pemilih pemula dapat menjadi pemilih-pemilih dengan pilihan yang bijak. Pilihan yang berdasarkan pertimbangan matang, bukan ikut-ikutan.

C. Simpulan

Ada konsekuensi logis yang diamanatkan kepada negara Indonesia dalam menjalankan sistem politik demokrasinya, yakni melakukan proses tranfer kekuasaan melalui mekanisme pemilihan umum. Dalam upaya menjaga sistem politik perlu diupayakan usaha-usaha bersama dalam menyelamatkan peran serta, partisipasi aktif pemilih didalam menyokong sistem demokrasi Indonesia, yakni dengan cara **“melindungi dan merekonstruksi literasi pemilih pemula sebagai strategi untuk mencapai Pemilu yang berkualitas di era milenial”**. Sejumlah kendala dan problem yang melingkupi pemilih pemula dewasa ini di antaranya; pemilih pemula belum melakukan perekaman dan pencetakan e-KTP, alias belum memiliki e-KTP; politisasi, Realitas politik uang, literasi regulasi pemilih pemula; budaya politik masyarakat; dan masalah teknologi. Merokonstruksi literasi pemilih pemula menjadi pemilih cerdas dapat mengambil bentuk dari apa yang disebut dengan konsep *civic literacy* yakni pengetahuan dan kemampuan warga dalam mengatasi masalah-masalah sosial, politik, dan kenegaraan yang menuntut warganegara bertindak secara otonom. Literasi demokrasi bagi kalangan pemilih pemula merupakan pintu masuk bagi lahirnya praktek demokrasi yang berkualitas. Disisi lain, hal tersebut juga akan memacu pesatnya pertumbuhan demokrasi dalam balutan egalitariansi menuju praktek pemilu yang beradab.

Daftar Pustaka

- Andi F. Bakti. 2017. Literasi Politik Dan Kampanye Pemilu: FIKOM UP Press.
- Azra, Azyumardi 2003. Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani. Tim ICCE UIN Jakarta. Jakarta: Prenanda Media.
- Gafar, Afan. 2004. "Politik Indonesia" Transisi Menuju Demokrasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hanvitra, 2019. Demokrasi Tanpa Literasi. <https://www.kompasiana.com/hanvitra/57b905948523bd050b5a7940/demokrasi-tanpa-literasi?page=all>. (diakses tanggal 29 September 2019).
- Hasan, Aswar. 2019. Demokrasi Pemilu yang Mematikan. Republica.co.id. <https://www.republika.co.id/berita/kolom/wacana/19/04/29/pqqbo1282-demokrasi-pemilu-yang-mematikan>. (diakses tanggal 29 September 2019).
- Kantaprawira, Rusadi. 2006. "Sistem Politik Indonesia" Suatu Model Pengantar. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Kantaprawira, Rusadi. 2006. "Sistem Politik Indonesia" Suatu Model Pengantar. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Koirudin. 2004. "Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi" Menakar Kinerja Partai Politik Transisi Di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mahfud. MD. 1998. Politik Hukum Indonesia. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.
- 1999. Hukum Dan Pilar-Pilar Demokrasi. Yogyakarta: Gema Media
- Wahab, A Aziz & Sapriya. (2011). Teori dan Landasan Pendidikan Kewarganegaraan. Bandung: Alpadeta
- Winatapura, U.S. (2001). Jati diri Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Wahana Sistemik Pendidikan Demokrasi (Suatu Kajian Konseptual dalam Konteks Pendidikan IPS). Disertasi. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia
- Riewanto, Agus. 2019. Konsolidasi Demokrasi dalam Pemilu 2019. <https://kolom.tempo.co/read/1196058/konsolidasi-demokrasi-dalam-pemilu-2019/full&view=ok>. (diakses tanggal 29 September 2019).
- Syarbaini, Syahril. dkk. 2002. Sosiologi dan Politik. Jakarta: Galia Indonesia
- Winarno, Budi. 2007. "Sistem Politik Indonesia Era Reformasi" Budaya Politik Era Reformasi Tetap bercorak patrimonial, Berorientasi Kekuasaan dan Kekayaan (Power and Wealth) dan Bersifat Paternalistik. Jakarta: Media Persindo.
- Wikipedia (2019). Budaya Bebas: Bagaimana Media Besar Memakai Teknologi dan Hukum untuk Membatasi Budaya dan Mengontrol Kreativitas. <https://id.wikipedia.org> (diakses tgl 24 September 2019).
- Wikipedia (2019). Literasi <https://id.wikipedia.org> (diakses tgl 24 September 2019).